

PENCIPTAAN DAN PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN PERDAMAIAN DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI: DIMENSI EKONOMI

Aburizal Bakrie

Salah satu sumber gangguan keamanan dan perdamaian dalam hubungan internasional maupun interaksi sosial antarmanusia, ialah kesenjangan. Suatu organisasi tidak akan bisa berjalan efektif bila para pengurusnya mengalami kesenjangan wawasan, kesenjangan intelektual. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap belum stabil, bila basis partisipasi aktifnya timpang secara struktural, sektoral dan spasial. Dalam aspek kehidupan ekonomi dan sosial-ekonomi, kesenjangan ini amat mudah memicu kecemburuan. Selanjutnya kecemburuan (sosial), apapun bentuknya, tidak akan pernah mendukung upaya penciptaan dan pemeliharaan keamanan dan perdamaian.

Bisa saja tatanan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di atas permukaan terkesan cukup stabil, aman, dan damai. Tetapi bisa dipastikan terjadi benturan-benturan dan bahkan situasi kontradiktoris di bawah permukaan, jika kesenjangan sosial cukup lebar. Perencanaan dan kebijakan di tingkat pusat boleh jadi diambil lewat mekanisme koordinasi yang padu dan harmonis. Tetapi implementasi lapangannya di daerah bisa sangat lain ceritanya, bila etos profesionalisme pelayanan publik cukup senjang antara pusat dan daerah.

Perimbangan Kekuatan

Ada benarnya pendapat bahwa untuk memastikan apakah suatu bangsa hidup berkemakmuran, jangan lihat pengusaha-pengusaha kakapnya. Lihatlah realitas sosio-ekonomi rakyatnya. Bahkan di lingkungan dunia usaha ada semacam "aksioma" bahwa kecepatan dokar yang ditarik oleh empat ekor kuda, justru ditentukan oleh kuda yang

larinya paling lamban. Kalau ini dapat diterima, maka golongan-golongan masyarakat dan daerah-daerah kita yang relatif masih amat tertinggal, sektor ekonomi dan usaha yang masih diliputi kekurangan atau malahan ketiadaan infrastruk-

*Ir. Aburizal Bakrie
Presiden Komisaris Kelompok Bakrie dan Ketua
Umum Kadin*

tur pendukung, memang amat ber-alasan untuk diberi prioritas perhatian yang selain lebih besar, juga lebih fokus.

Barangkali aksioma itu juga dapat dianalogikan bahwa, bila dalam satu masyarakat atau bangsa terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial ekonomi yang cukup dalam, maka stabilitas ekonomi di situ hanya bersifat semu. Bila tanah-tanah rakyat di suatu daerah tertentu begitu saja diserobot, atau proses bisnis komoditi andalan mereka beralih tangan, misalnya ke mekanisme tata-niaga, maka rasa aman dan rasa damai masyarakat di daerah itu pun boleh jadi hanya bersifat semu. Rakyat gelisah karena bila ada peninjauan lokasi dari pihak pemerintah atau dari penguasa, rakyat lalu bertanya-tanya tanah siapa lagi yang akan "diambil", komoditi apalagi yang akan ditataniagakan.

Total aset setiap organisasi usaha tidak mungkin sama persis. Kemampuan beli setiap orang atau potensi ekonomi setiap daerah juga demikian. Hal ini harus diterima sebagai bagian dari kebhinnekaan. Namun kecemburuan sosial terpicu kalau yang telah mampu makin besar, makin kuat dan makin mementukan; sementara yang lemah dan kecil makin kehilangan peluang. Kecemburuan tersebut sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik sosial terbuka (yang artinya krisis keamanan dan perdamaian), bila lapisan terbesar

rakyat merasa tersingkir, sementara segelintir kalangan tertentu malah melintang sekehendaknya. Begitu juga kurang lebih gambarnya pada interaksi ekonomi di tingkat regional, internasional, multinasional dan global. Praktek eksploitasi ekonomi negara-negara maju di negara-negara berkembang pasti menimbulkan reaksi negatif.

Itu berarti dari sudut ekonomi, menciptakan dan memelihara keamanan dan perdamaian juga sangat terkait dengan perimbangan kekuatan secara proporsional dan wajar. Baik perimbangan kuantitatif (aset usaha, fasilitas kesempatan berusaha, *market share*) maupun perimbangan kualitatif (kesetaraan *positioning* dan *functioning* dalam mekanisme pasar, atau kesetaraan sebagai obyek hukum). Dengan perimbangan-perimbangan dinamis begitulah maka pertumbuhan memiliki basis yang kuat dan luas, dan dengan itu pula pemerataan lebih luas cakupan dan jangkauannya.

Namun demikian, para pakar dan ahli umumnya sepakat bahwa tatanan kehidupan suatu bangsa tak akan pernah sepi dari *social gap*. Sistem ekonomi pasar atau mekanisme pasar yang sehat dan dinamis, berkerakyatan dan berkeadilan sosial tanpa campur tangan pemerintah, juga hanya "ada" dalam kuliah semester pertama fakultas ekonomi. Ada saja yang menyebabkan kelompok-kelompok masyarakat, organisasi usaha dan pelaku

utama ekonomi tertentu lebih maju, sedang yang lain agak tertinggal. Ini kita sebut ketimpangan struktural. Juga ada saja yang menyebabkan belum terkaitnya industri hulu dengan hilir; sektor tertentu lebih bergairah dan yang lain agak lamban dan memudar. Jenis ini disebut *ketimpangan sektoral*. Demikian juga keadaannya dengan proses aktualisasi potensi ekonomi daerah-daerah yang umumnya disebut *kesenjangan spasial*.

Kebijakan Ekonomi Politik HAM

Mengurangi atau menekan serendah-rendahnya kesenjangan tersebut, hanya dapat dilakukan dengan memberantas sumber dominannya. Pada tingkat kemajuan dan dinamika ekonomi di era globalisasi sekarang. Untuk memberantas sumber kesenjangan diperlukan adanya semacam politik ekonomi baru. Katakanlah politik ekonomi yang benar-benar berkerakyatan dan berkeadilan, sekaligus peka terhadap perubahan dan dinamika ekonomi global.

Politik ekonomi baru itulah yang kemudian dituangkan dalam sistem—yaitu keseluruhan aturan main dan mekanisme yang mengikat secara hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan secara etik, moral dan budaya. Sistem ini harus disepakati, diacu dan ditegakkan dengan derajat konsistensi yang tinggi. Kita tentunya tidak

menafikan kisah-sukses pembangunan ekonomi sampai pertengahan Pelita VI sekarang. Hanya saja, lingkungan strategis perekonomian dengan demikian juga dunia usaha telah berubah dan terus berkembang dinamis, sementara refleksi politik ekonomi kita—misalnya dalam mekanisme pasar—tetap berkecenderungan “*government heavy*”. Dunia usaha seakan-akan belum dipercaya benar, sementara pola persaingan global telah bergeser dari persaingan antarbangsa ke persaingan antarusaha.

Dalam konteks Indonesia, cara perimbangannya ialah persebaran dan aktualisasi sentra-sentra pertumbuhan baru, lengkap dengan infrastruktur industri dan pendidikan, sebagai penajaman pendekatan kawasan bagian dari strategi penanggulangan ketimpangan spasial. Selain itu, konglomerasi vertikal yang menguasai hulu-hilir tidak lagi ditolerir. Berbarengan dengan itu, inisiatif dan prakarsa-prakarsa ekonomi rakyat didukung lewat pemberdayaan yang lebih nyata, sebagai implementasi “politik ekonomi baru” seperti yang telah ditawarkan di atas, misalnya fasilitasi permodalan sampai usaha-usaha ekonomi rakyat mencapai tingkat usaha industri yang kuat, pendampingan manajemen, penyediaan infrastruktur pendidikan dan pelatihan. Bahkan juga pencadangan bidang-bidang usaha tertentu dan jaminan kepastian pasarnya sebagai bagian dari strategi penanggulangan ketimpangan struktural.

Sementara itu, industri manufaktur kita sudah perlu ditransformasi atau direstrukturisasikan. Industri manufaktur padat keahlian mulai dipicu, dengan melibatkan potensi pendukung produksi dan jasa-jasa dari pengusaha menengah, kecil dan koperasi. Yang padat tenaga dan bahan mentah atau sumber daya alam mulai dilengkapi dengan perencanaan R & D, terutama dalam kerangka *secondary product* yang nilai tambahnya jauh lebih tinggi. Industri hulu lebih dimatarantakan dengan industri hilir dalam negeri. Dan yang tidak kurang pentingnya ialah keharmonisan kebijakan makro dan mikro; sektor fiskal-moneter dengan sektor riil; serta di antara sub-sub sektor itu sendiri, yang kesemuanya merupakan bagian dari strategi penanggulangan ketimpangan sektoral.

Melenyapkan Distorsi Ekonomi

Untuk menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dengan semangat perdagangan dan investasi bebasnya, *macro-imperatives* perekonomian Indonesia sebenarnya telah cukup bagus. Pakar dan pengamat di luar negeri, termasuk lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF dan sebagainya juga mengakui hal itu. Secara nasional, ekonomi Indonesia dianggap *the awakening middle-income market*. Jika sumber daya manusianya yang no-

tabene sumber daya manajemen telah memiliki tingkat kompetensi *entrepreneurial* dan bisnis modern di atas rata-rata; jika sumber kekayaan alamnya sudah lebih banyak berkembang ke tahap *secondary product*, maka ekonomi Indonesia amat potensial menjadi ekonomi industri terkemuka di Asia Pasifik.

Sekarang saja, tidak sedikit sektor ekonomi dan sektor usaha kita telah diakui sebagai *trend-setter* pertumbuhan. Penemuan-penemuan murni kita (*social invention*) di sektor pertanian seperti BIMAS, PERWILAYAHAN KOMODITAS dan sebagainya, bahkan telah berhasil merubah status Indonesia dari bangsa pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang berswasembada. Di bidang konstruksi, rekayasa dan rancangbangun pun tidak sedikit putra-putri terbaik Indonesia telah mengharumkan nama bangsa dengan karya-karya prestatif mereka.

Hanya saja pada *macro-imperatives* tadi terjadi begitu banyak pengencualian dan pengistimewaan, serta tidak jarang pengaruh kelembagaan atau proses nonformal di luar kepentingan obyektif ketiga pelaku utama ekonomi lebih mewarnai kebijakan ekonomi. Lahirlah berbagai bentuk kolusi dan distorsi-distorsi ekonomi yang lain. Mekanisme pasar jadinya terkesan kuat didikte oleh kemampuan lobi pelaku yang tidak kentara atau oleh kepentingan terselubung tetapi

memiliki justifikasi kebijakan.

Menteri Siswono bahkan dengan terbuka menyatakan adanya sementara politisi dan juga pejabat negara yang dapat dibeli oleh pengusaha-pengusaha tertentu. Artinya kebijakan sektoral yang mereka tangani selalu "bisa diatur" oleh pengusaha tertentu tersebut. Kasarnya ialah didikte oleh kehendak-kehendak subyektif pengusaha dimaksud, apakah karena faktor kemampuan lobi kekuasaan atau karena kolusi, atau dua-duanya.

Akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial ekonomi terus saja meluas dan mendalam. Lebih dari itu ialah maraknya kecemburuan dan rasa ketidakadilan. Sekitar 80 persen aset ekonomi dan peluang usaha tetap berada dalam orbit kegiatan segelintir kalangan; sementara lapisan terbesar rakyat, termasuk 33 juta pengusaha kecil, menengah dan koperasi, hanya menikmati 20 persen.

Yang selalu dikeluhkan sebagai salah satu sumber dominan kesenjangan tersebut ialah belum berimbangannya struktur dunia usaha. Hal ini memang benar. Tetapi di balik ketidakseimbangan struktur tersebut sesungguhnya terdapat "*silent favoritism*", dan karena itu juga "*silent discrimination*." Hal-hal seperti ini pulalah yang melahirkan stabilitas semu—termasuk keamanan dan perdamaian semu. Oleh karena itu ada benarnya fikiran kritis

bahwa kesatuan dan persatuan kita di bidang ekonomi belum punya wajah yang jelas, meskipun konsep dasarnya seperti ekonomi integralistik, satu kesatuan ekonomi dan sebagainya, telah diakui dan diterima secara formal.

Di lain pihak, sebagian kebijakan sektoral juga diterapkan secara kaku. Peluang-peluang usaha dan investasi yang semestinya telah terealisasi pada kesempatan pertama, tidak jarang tertunda bahkan beralih ke lain pasar gara-gara kekakuan tersebut—yang umumnya disebabkan oleh dua hal: egoisme sektoral dan atau kelambanan adaptasi-antisipasi gerak dinamika globalisasi ekonomi. Karena itu aspirasi dan kepentingan obyektif dunia usaha dalam kerangka perdagangan dan investasi global, sudah sepantasnya didukung oleh sikap tanggap penentu kebijakan.

Pengaruh lebih jauh dari pengistimewaan ialah maraknya kegiatan usaha pemburu rente (*money engineering*) dan usaha-usaha spekulatif, yang kesemuanya memicu ekonomi biaya tinggi — selain melemahkan kredibilitas ekonomi Indonesia di mata internasional. Pengistimewaan juga melahirkan prasangka buruk tidak hanya di antara sesama pelaku ekonomi. Tetapi juga di antara penentu kebijakan itu sendiri, serta antara penentu kebijakan dan pelaku ekonomi. Ini jelas kontra-produktif

dari upaya-upaya pengembangan kemitraan-sinergis antarusaha dan antarsektor ekonomi, yang berarti pendekatan *team working* kita masih cukup lemah. Egoisme sektoral akhirnya terus saja bermunculan, justru ketika persaingan ekonomi global memerlukan praktek kerja tim dari kita sebagai bangsa. Pada ujungnya, aktualisasi aset-aset ekonomi rakyat, wilayah dan daerah, menjadi terhambat.

Ekonomi biaya tinggi barangkali dapat disebut sebagai kebocoran anggaran dan bahkan kebocoran sistem; sementara terhambatnya aktualisasi aset ekonomi rakyat dan daerah bisa disebut kelambanan sistem — selain tentunya faktor lemahnya etos profesionalisme SDM dan pelayanan publik.

Penyiapan Sektor Pendidikan dan Pelatihan

Hal lain yang perlu digarisbawahi dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi ialah penyiapan infrastruktur pendidikan dan pelatihan SDM, khususnya untuk mencetak pemimpin dan manajer-manajer bisnis profesional. Sebagai ilustrasi, dari 25 pendidikan bisnis terbaik Asia tahun 1996 ini, tidak satu pun dari Indonesia. Kita kalah dibanding Malaysia, Thailand, Philipina, Singapura, Pakistan dan negara-negara *lower middle-income* yang lain.

Tahun-tahun terakhir ini dunia

usaha kita terpaksa terlibat dalam praktek bajak-membajak tenaga manajer profesional, atau mengimpor profesional asing, sekalipun mereka harus dibayar dengan amat mahal. Sampai tahun 1996 ini saja, konsultan dan manajer profesional asing di Indonesia sudah mencapai sekitar 33 ribu. Devisa yang diserap sebagai pendapatan bersih mereka sama dengan gaji sebulan keseluruhan 4 juta pegawai negeri sipil, yaitu sekitar Rp 5 trilyun. Dan ini tentunya merupakan sumber ketidakseimbangan baru, yang pada waktunya akan memunculkan bentuk-bentuk kecemburuan sosial baru pula.

Oleh karena itu para penyelenggara sektor pendidikan dan pelatihan perlu merancang manajemen pendidikan, yang dalam materi kurikulum dan proses belajar-mengajarnya melibatkan secara dinamis unsur-unsur terbaik dari dunia industri, dunia militer, serta dari profesi-profesi yang lain. Penekanannya ialah bagaimana pengetahuan atau informasi keilmuan yang diperoleh peserta didik dapat dikonversi menjadi keterampilan, sehingga kompetensi teknis-bisnis SDM kita misalnya, telah berbasis *knowledge*.

Berkaitan dengan itu, spesialisasi dan program-program pendidikan kejuruan dipicu, supaya keluaran pendidikan telah siap beradaptasi secara kreatif dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Dan tentu amat mendukung jika setiap

proporsi, setidaknya-tidaknya memiliki satu atau dua institusi pendidikan dan pelatihan menengah dan tinggi, yang dikelola khusus sebagai basis pengembangan potensi ekonomi khas propinsi bersangkutan. Katakanlah di Irian Jaya ada sekolah menengah kehutanan dan perguruan tinggi yang berpretensi *center of excellence* di bidang kehutanan. Propinsi NTT maju pendidikan peternakannya; NTB tentang pertanian dan pengairan; Maluku mungkin dengan disiplin ekonomi kelautan; dan seterusnya. Dengan demikian potensi-potensi ekonomi masing-masing propinsi kita pada akhirnya akan memiliki cadangan sumberdaya terdidik dengan spesialisasi yang pas.

Apalagi kalau kemudian aspek R & D juga difasilitasi. Terutama untuk mengurangi ketergantungan kita pada impor teknologi, untuk kemudian menciptakan teknologi-teknologi baru. Perlu diketahui bahwa kecenderungan perekonomian dunia sekarang telah menempatkan teknologi sebagai faktor keunggulan daya saing. Siapa yang paling maju kegiatan-kegiatan inovasi teknologinya dialah yang paling unggul. Sekarang sudah terbukti di mana-mana, yang berdaya saing paling kuat ialah *knowledge-based economy*. Itu sebabnya organisasi usaha yang tak mampu memetik keuntungan dari kemajuan teknologi *cyberspace* seperti jaringan komputer dalam sistem Internet

misalnya, bisa dipastikan akan keteter.

Yang juga ingin ditawarkan dengan mengangkat faktor pendidikan di sini ialah, bahwa penekanan pendekatan kawasan dalam pembangunan ekonomi, hanya akan melahirkan dilema-dilema sosial baru jika kesiapan dan persiapan SDM kurang diperhatikan. Untuk mengembangkan daerah-daerah tertinggal, katakanlah misalnya di KTI, kita tidak cukup hanya dengan melengkapi infrastruktur ekonomi. Infrastruktur pendidikannya juga harus dikedepankan.

Dalam kerangka kerjasama ekonomi ASEAN misalnya, kita telah mengembangkan beberapa daerah segitiga pertumbuhan—sebagai *sub-regional development*. Pertanyaannya ialah ketika AFTA berlaku efektif di tahun 2003, pasar bebas APEC di tahun 2020, *who is going to manage?* Apakah kita hanya sampai menyiapkan daerah-daerah sebagai kawasan pertumbuhan bersama, sementara yang mengelola peluang-peluang usaha di situ kelak profesional asing lagi — seperti keadaan di dunia usaha sekarang?

Ini perlu kita antisipasi dan diskusikan bersama, karena sekali lagi, supremasi dan dominasi profesional asing juga merupakan potensi kecemburuan sosial, yang pada akhirnya bisa mengganggu upaya menciptakan dan memelihara keamanan dan perdamaian.